

DEKONSTRUKSI ASET TETAP PEMERINTAH OLEH AKUNTAN KOTA BANJARMASIN

by Padjrian Nor

Submission date: 09-Feb-2023 08:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2000250317

File name: JURNAL_JWM_BU_AYU-1.docx (363.74K)

Word count: 6944

Character count: 45990

DEKONSTRUKSI ASET TETAP PEMERINTAH OLEH AKUNTAN KOTA BANJARMASIN

Ayu Oktaviani

(Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

e-mail : aoktaviani@ulm.ac.id

Monica Rahardian Ary Helmina

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

e-mail: monicarahardian@ulm.ac.id

Pusvita Indria Mei Susilowati

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

e-mail: pusvita.susilowati@ulm.ac.id

Ibnu Sutomo

(Jurusan Akuntansi, STIE Pancasetia Banjarmasin)

e-mail : ibnusutomo1368@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to deconstruct the understanding of fixed assets in government institutions, using deconstructive semiotic studies based on Jacques Derrida's philosophy. Specifically, the research objectives are First, to understand the interpretation of financial statement providers on fixed assets, and evaluate their understanding of the concept of fixed assets applied in accounting. Second, carrying out a search for meaning (semiotics) structurally and deconstructive on the interpretation of fixed assets to reveal the structural reality that appears on the surface and is hidden behind the interpretation. This type of research is qualitative. Respondents were accountants in Banjarmasin, consisting of teaching accountants, government accountants, management accountants and public accountants.

The results of the study concluded that accountants clearly understood the definition of fixed assets, especially government fixed assets. The structural meaning of semiotics Assets are all economic resources as a result of past events that have been controlled, owned by the government, assets have future economic and social benefits that will be achieved, either by the government or the community. Assets can be measured in terms of money, as well as non-financial resources. Necessary for the provision of services to the general public and these resources are maintained due to history and culture. Assets can be purchased on the APBD. Government assets that are the property of the government are obtained from past activities that are used for economic or social activities and are continuously used by the government. Assets can be measured in units of money, non-financial useful life of more than 12 months. Intended for use, in government or public activities. This finding has a fundamental contribution to the field of accounting science because it provides semiotic fundamental ideas for accounting standard setting policies.

Keywords: Fixed assets, fixed assets in the public sector, Jacques Derrida's Deconstruction

ABSTRAKS

Tujuan penelitian ini adalah melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman aset tetap pada institusi pemerintahan, dengan menggunakan kajian semiotika dekonstruktif berbasis filsafat Jacques Derrida. Secara khusus, tujuan penelitian adalah Pertama, memahami penafsiran penyedia laporan keuangan atas aset tetap, serta mengevaluasi pemahaman mereka atas konsep aset tetap yang diterapkan dalam akuntansi. Kedua, melakukan pencarian makna (semiotika) secara struktural dan dekonstruktif atas penafsiran aset tetap untuk mengungkap realitas yang secara struktural tampak di permukaan dan tersembunyi di balik penafsiran tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Responden adalah para akuntan di Banjarmasin, terdiri dari akuntan pendidik, akuntan pemerintahan, akuntan manajemen dan akuntan publik.

Hasil penelitian Para akuntan memahami dengan jelas definisi Aset tetap terutama Aset tetap pemerintahan. Makna semiotika secara struktural Aset merupakan segala sumber daya ekonomi akibat dari peristiwa masa lalu yang telah dikuasai, dimiliki oleh pemerintah, aset memiliki manfaat ekonomi dan sosial di masa depan yang akan dicapai, baik oleh pemerintah atau masyarakat. Aset dapat diukur dalam satuan uang, juga sumber daya non-keuangan. Diperlukan guna penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya tersebut dipelihara karena sejarah dan budaya. Aset dapat dibeli atas APBD. Aset pemerintah yang menjadi hak milik pemerintah diperoleh dari aktifitas masa lalu yang digunakan untuk aktifitas ekonomi atau sosial penggunaannya secara terus menerus oleh pemerintah. Aset dapat diukur dalam satuan uang, nonkeuangan berumur manfaat

lebih dari 12 bulan. Dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau masyarakat umum. Temuan ini mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu akuntansi karena memberikan gagasan mendasar secara semiotik bagi kebijakan penetapan standar akuntansi.

Kata Kunci: Aset tetap, Aset tetap pada Pemerintahan, Dekonstruksi *Jacques Derrida*.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, penerapan *accrual* basis bagi pemerintah wajib dilaksanakan mulai tahun 2014, hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara penuh berbasis akrual yang merevisi Standar Akuntansi Pemerintahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Selama ini, pemerintahan baik pusat ataupun daerah mengacu pada akuntansi berbasis kas. Kelemahan utama akuntansi berbasis kas, adalah tidak adanya rekam jejak transaksi ekonomis secara riil, karena pencatatan dilakukan pada saat terjadi mutasi uang kas. Penerapan *accrual* basis memberikan konsekuensi bahwa terdapat beberapa akun yang harus di ukur dan di nilai berdasarkan nilai *fair value* (nilai wajar). Bagi perusahaan privat, penerapan *fair value* terhadap aset tetap memberikan keuntungan karena akan memberikan informasi yang relevan terhadap pemakai, contoh: tanah yang selama ini dicatat sebesar harga perolehan, tidak dapat menunjukkan harga sesungguhnya pada saat pelaporan keuangan, padahal harga tanah sudah mengalami kenaikan berlipat ganda. Akan tetapi, penerapan konsep *fair value* pada pemerintahan menimbulkan banyak problem.

Investasi yang sudah dilakukan pihak Pemerintah Daerah salah satunya adalah pembelian aset untuk kebutuhan masyarakat sehingga dalam pengadaan aset wajib sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aset tetap diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada komponen Belanja Daerah dengan klasifikasi belanja langsung yang disebut Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembelian, pengadaan dan penggunaan aset berwujud yang mempunyai manfaat diatas dua belas bulan untuk kegiatan pemerintah, antara lain tanah, gedung, mesin dan bangunan, peralatan atau saluran irigasi serta aset tetap lainnya (Darise, 2008). Sebelum investasi terlebih dahulu dilakukan analisis dengan untuk mengetahui kelayakan investasi, agar investasi tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan masyarakat (Helmina dan Erdilla, 2022). Analisis kelayakan investasi diperlukan pertimbangan beberapa aspek yang menunjukkan keuntungan dan manfaat yang didapatkan dari investasi tersebut. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek teknis, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya dan aspek distribusi (Mardiasmo,2009).

Riset Stanton (1997) menemukan bahwa penerapan akuntansi pada pemerintahan Australia merupakan praktek swastanisasi pada lembaga publik. Barton (1999) dalam risetnya akuntansi untuk aset modal alam, menjelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntansi *accrual* di sektor pemerintah adalah bahwa akuntansi untuk aset modal alam yang tersedia secara bebas kepada pemerintah dan yang digunakan sebagai barang publik. Permasalahan pelik dalam intepretasi Aset Tetap berdasar SAP, sejauh ini belum banyak di teliti, apakah pendefinisian serta perlakuan akuntansi tersebut memiliki kesamaan makna bagi para pemakai SAP. Lebih khusus lagi pada aset yang berupa barang publik yang berupa kekayaan alam, aset sejarah (*heritage asset*) sangat sulit menetapkan nilai *fair value*. Di lain pihak, akuntansi sebagai bahasa seharusnya memberikan pemaknaan atau penafsiran yang sama bagi setiap pelaku, kondisi model akuntansi aset tetap yang terjadi di pemerintah juga menimbulkan penafsiran yang berbeda beda bagi antar individu dalam pemerintahan. Penelitian di sector public memang relative sedikit, penelitian Yuniarto (2020) juga menunjukkan suatu revaluasi aset yaitu media dalam rangka memperbaiki penatausahaan aset tetap dengan pembentukan sebuah database aset supaya hasil revaluasi dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Ngoc (2020) berpendapat peran nilai wajar akuntansi pada praktik dan standar akuntansi internasional, Vietnam menerapkan nilai wajar hanya pada saat pengakuan awal sehingga terdapat kendala disaat mengadopsi IFRS.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 memperoleh

opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini ini diterima Provinsi Kalimantan Selatan secara berturut-turut dalam 8 tahun. Akan tetapi, BPK masih menemukan permasalahan dalam Penatausahaan Aset Tetap yang belum konsisten (Kalsel.bpk.go.id). Kondisi ini membuat pertanyaan besar, apakah para pelaku di pemerintahan memiliki kesamaan persepsi atau tidak terhadap penatausahaan aset tetap. Berdasarkan fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan dekonstruksi terhadap model akuntansi (pengakuan, pencatatan, pengukuran, penilaian dan pelaporan) aset tetap pada institusi pemerintahan, dengan menggunakan kajian semiotika dekonstruktif berbasis filsafat Jacques Derrida. Secara khusus, tujuan penelitian adalah Pertama, memahami penafsiran penyedia, pembaca dan pengguna laporan keuangan atas aset tetap, serta mengevaluasi pemahaman mereka atas konsep aset tetap yang diterapkan dalam akuntansi. Kedua, melakukan proses pencarian makna (semiotika) secara struktural dan dekonstruktif atas penafsiran aset tetap untuk mengungkap suatu realitas yang secara struktural tampak di permukaan dan tersembunyi di balik penafsiran tersebut. Dalam penelitian ini dekonstruksi merupakan upaya untuk mengurai teks ataupun kata-kata, bahkan sistem pemikiran yang terefleksikan dalam kerangka konseptual dan standar akuntansi, dekonstruksi bersumber pada pemunculan teks atau pemikiran baru tanpa harus menolak sistem pemikiran yang sudah ada. Sehingga target temuan yang ditetapkan dari penelitian adalah kaidah model akuntansi aset tetap yang relevan dengan karakteristik sektor publik (pemerintahan), temuan ini mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu akuntansi karena memberikan gagasan mendasar secara semiotik terhadap kebijakan penetapan standar akuntansi.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan berkaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi di sektor publik. Sektor publik mencakup wilayah yang luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Dari sisi kelembagaan, Sektor publik meliputi perusahaan milik negara dan daerah, badan-badan pemerintahan, yayasan, organisasi massa dan organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi nirlaba lainnya. Menurut Ranuba et al. (2015) akuntansi pemerintahan adalah suatu proses yang sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke tahap proses pelaporan keuangan dilanjutkan pertanggungjawaban kepada public. Karakteristik yang utama dapat membedakan entitas akuntansi pemerintah dan sektor privat, adalah orientasi keuntungan. Pemerintah khususnya Negara mempunyai tujuan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran pemilik, sehingga akuntansi pemerintah seharusnya ditujukan pada proses akuntabilitas dan transparansi yang mampu meningkatkan kemakmuran rakyat. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang standar akuntansi pemerintahan, yang berbasis akrual yaitu mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan pada pelaporan pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Pengertian Aset Tetap

Menurut Darise(2008), "Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum". Ikatan Akuntan Indonesia pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan selama proses produksi atau saat penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan, untuk tujuan administratif diperkirakan juga untuk digunakan selama lebih dari satu periode (satu tahun). Aset tetap merupakan aset berwujud (*tangible assets*) dimana kekayaan secara fisik dapat dimanifestasikan menggunakan panca indera.

Aset berwujud sesuai PSAK (2009) adalah yang dimiliki untuk digunakan pada produksi atau penyediaan barang atau jasa, dapat direntalkan pihak lain selain itu juga bertujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode (1 tahun). Aset tetap memiliki karakteristik yaitu aset diperoleh digunakan selama proses operasi, tidak dijual kembali, jangka

panjang juga sebagai subjek penyusutan. Sedangkan Kieso (2008) Aset tersebut memiliki substansi fisik.

Menurut SAP no.7 disebut aset tetap, jika aset memiliki wujud, memiliki kriteria : memiliki masa manfaat lebih dari 12 tahun, biaya perolehan aset secara andal dapat diukur, tidak bertujuan untuk dijual saat operasi normal entitas, diperoleh, dibangun untuk maksud digunakan. Sedangkan pengukuran aset tetap lebih berdasarkan biaya perolehan.

Dekonstruksi

Dekonstruksi merupakan suatu teori dari Jacques Derrida (2003) yaitu seorang ahli filsafat. Dekonstruksi merupakan Teknik atau cara membaca sebuah teks (filsafat maupun sastra) yang terpengaruh oleh pandangan fenomenologi dan skeptisisme. Derrida menciptakan teori ini dalam rangka menentang teori-teori struktural-semiotik dari Ferdinand de Saussure yang berpendapat bahwa suatu teks memiliki arti yang utuh di dalam suatu sistem bahasa tertentu. Ini membuat teori dekonstruksi Derrida termasuk Poststructuralism. Dekonstruksi juga mempertanyakan segala hal yang telah disetujui dan diakui secara masif tanpa adanya a priori (yang menciptakan atau membentuk pemahaman manusia).

Kontroversi mengenai metode yang tepat akuntansi untuk aset publik

Menurut Barton (2000) kontroversi mengenai metode yang tepat akuntansi untuk aset publik/masyarakat terus berlanjut di Australia dan Selandia Baru mengharuskan mereka dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Namun, banyak komentator akademik dan lembaga pengelolaan aset warisan masyarakat terus menentang bentuk akuntansi. (Rentschler dan Potter, 2016; Stanton dan Stanton, 1997; Barton, 2000; Newberry, 2001). Sedangkan Stanton and Stanton (1997) mengemukakan aset warisan harus dihargai memanfaatkan teori neo-klasik nilai. Pengukuran nilai-di-gunakan atau nilai-di-pertukaran aset warisan secara inheren subjektif, mengabaikan suatu kondisi kelembagaan dan nilai-nilai non-penggunaan. Suatu pendekatan akuntansi gagal mengukur baik dari nilai layanan dan atau manfaat ekonomi dari sebuah aset warisan pemerintah. Sehingga mengakibatkan, informasi yang dihasilkan dengan alasan ekonomi tidak konsisten. Proses penilaian dapat merugikan salah penilaian kinerja entitas yang bertanggung jawab atas aset tersebut. Barton (2000) menyatakan bahwa seharusnya pelaporan barang publik tidak mengikuti prinsip akuntansi komersial, penetapan standar komersial dalam pemerintahan akan memberikan dampak luas terhadap pemakai laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan perlakuan dan penerapan akuntansi pada domain/sector publik. Sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, sektor publik terdiri dari perusahaan milik negara dan daerah, badan-badan pemerintahan, organisasi politik dan organisasi massa, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya. Ranuba et al. (2015) akuntansi pemerintahan adalah sebuah proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah dimulai dari adanya bukti transaksi hingga ke proses pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pada publik. Karakteristik utama yang membedakan antara entitas akuntansi pemerintah dan sektor privat, yaitu pada hal orientasi keuntungan. Pemerintah dalam hal ini negara memiliki tujuan bukan untuk kemakmuran pemilik, akan tetapi kemakmuran masyarakat, sehingga akuntansi pemerintah semestinya ditujukan untuk proses akuntabilitas dan transparansi yang meningkatkan kemakmuran rakyat.

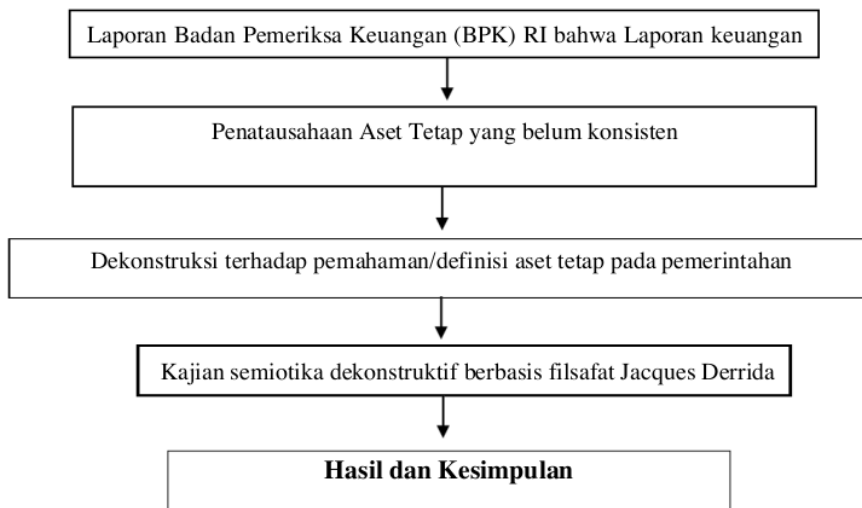
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Kemendagri dalam situs resminya menjelaskan beberapa manfaat penerapan SAP pada Study Nomor 14 yang berbasis akrual yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* menyatakan bahwa sebuah informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan bertujuan :

1. Menilai suatu akuntabilitas pengelolaan pada seluruh sumber daya entitas juga penyebaran sumber daya entitas tersebut.
2. Menilai suatu kinerja, arus kas dan posisi keuangan dari sebuah entitas.
3. Untuk Pengambilan keputusan berkaitan penyediaan sumber daya untuk proses bisnis suatu entitas.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini ini diterima Provinsi Kalimantan Selatan secara berturut-turut dalam 8 tahun. Akan tetapi, BPK masih menemukan permasalahan dalam Penatausahaan Aset Tetap yang belum konsisten (Kalsel.bpk.go.id). Kondisi ini membuat pertanyaan besar, apakah para pelaku di pemerintahan memiliki kesamaan pemahaman atau tidak terhadap penatausahaan aset tetap. Berdasarkan fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan dekonstruksi terhadap model akuntansi (pengakuan, pencatatan, pengukuran, penilaian dan pelaporan) aset tetap pada institusi pemerintahan, dengan menggunakan kajian semiotika dekonstruktif berbasis filsafat Jacques Derrida. Secara khusus, tujuan penelitian adalah Pertama, memahami penafsiran penyedia, pembaca dan pengguna laporan keuangan atas aset tetap, serta mengevaluasi pemahaman mereka atas konsep aset tetap yang diterapkan dalam akuntansi. Kedua, melakukan pencarian makna (semiotika) secara struktural dan dekonstruktif atas penafsiran aset tetap untuk mengungkap realitas yang secara struktural tampak di permukaan dan tersembunyi di alik penafsiran tersebut. Dalam penelitian ini dekonstruksi merupakan upaya untuk mengurai teks ataupun kata-kata, bahkan sistem pemikiran yang terefleksikan dalam rerangka konseptual dan standar akuntansi, dekonstruksi bersumber pada pemunculan teks atau pemikiran baru tanpa harus menolak sistem pemikiran yang sudah ada. Sehingga target temuan yang ditetapkan dari penelitian adalah kaidah model akuntansi aset tetap yang relevan dengan karakteristik sektor publik (pemerintahan), temuan ini mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu akuntansi karena memberikan gagasan mendasar secara semiotik terhadap kebijakan penetapan standar akuntansi. Kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan pada gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: (data diolah peneliti, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait dengan dekonstruksi aset tetap pada sektor publik, sejauh ini belum banyak dilakukan. Topik penelitian akuntansi sektor publik lebih pada kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaporan berbasis keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ulang dan menunjukkan pencarian makna aset tetap pada daerah. Penafsiran dan pemahaman akuntan berkaitan aset tetap daerah. Penelitian tidak secara spesifik mencari hingga ketidakberhasilan upaya kehadiran kebenaran absolut, tidak mengupas agenda yang tersembunyi sehingga banyak kelemahan dan kepincangan pada kata aset tetap.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menurut Creswell (2015) memaparkan bahwa metode ini untuk lebih memahami, mengeksplorasi sebuah fenomena yang terjadi di objek penelitian. Terdapat jenis-jenis pendekatan kualitatif selain yang diungkapkan Carrigan (1996) yaitu penelitian naratif, *grounded theory*, riset fenomenologi, studi kasus dan etnografi. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam dengan pengumpulan data dan informasi dari para nara sumber/informan/subjek.

Subjek Dan Objek Penelitian

Informan Penelitian

Topik penelitian akuntansi sektor publik lebih pada kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaporan berbasis keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ulang dan menunjukkan pencarian makna aset tetap pada daerah. Penafsiran dan pemahaman akuntan berkaitan aset tetap daerah. Namun tidak spesifik hingga mencari ketidakberhasilan upaya kehadiran kebenaran absolut, mengupas agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan kepincangan di balik kata aset tetap. Informan dalam penelitian adalah para Akuntan di Kota Banjarmasin yang terdiri atas:

1. Akuntan pendidik
2. Akuntan pemerintah
3. Akuntan publik
4. Akuntan manajemen

Akuntan pendidik adalah pendidik (dosen), akuntan yang bekerja di pemerintah yang berkaitan aset, akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan public (KAP) dan akuntan manajemen yang bekerja pada kantor konsultan manajemen, dipilih untuk mewakili pihak yang menyediakan informasi akuntansi yang telah memiliki pengalaman 10 th. Pemilihan informan ini dilakukan secara sengaja, berpedoman pada kriteria tertentu, yaitu subyek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktivitas sasaran penelitian, subyek dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh, serta subyek masih terlibat secara aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara dengan subjek penelitian yaitu Informan dalam penelitian adalah para Akuntan di Kota Banjarmasin yang terdiri atas: Akuntan pendidik, Akuntan pemerintah, Akuntan public, Akuntan manajemen

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah upaya mencari penafsiran sebuah tanda dengan realitas referensialnya, maka penelitian ini dapat dikatakan berbasis pada semiotika. Semiotika dalam penelitian ini meliputi tiga tingkat, yaitu tingkat mikro, tingkat makro dan tingkat dekonstruktif atau semiotika radikal. Pada tingkat yang lebih tinggi ini interpretatif akan mengalami transformasi ke pendekatan kritis.

Menurut Carrigan (1996) Penelitian dekonstruksi terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pembacaan Semiotika struktural oleh informan –Tingkat mikro (penafsiran teks)

Dalam tahap ini informan diminta untuk menafsirkan aset tetap yang tersaji dalam laporan keuangan. Informan tidak diarahkan secara spesifik untuk melakukan pembacaan semiotika pada tataran rerangka konseptual, khususnya konsep aset tetap yang mendasari praktik akuntansi saat ini, yaitu konsep *fair value*.

2. **Pembacaan semiotika struktural oleh peneliti – Tingkat makro**
Dalam tahap ini peneliti diminta untuk melakukan penafsiran terhadap apa yang sudah ditafsirkan oleh informan, tujuan pembacaan semiotika tingkat makro adalah berupaya untuk menemukan dan memperoleh pemahaman tentang “realitas yang direpresentasikan oleh “teks baru” oleh informan.
3. **Refleksi teks akuntansi aset tetap pada filsafat dekonstruktif Jacques derrida**
Pada tahap ini ini peneliti diminta untuk melakukan analisis untuk mengungkapkan realitas yang tersembunyi sehingga menyebabkan munculnya penafsiran yang telah dilakukan oleh informan.
4. **Dekonstruksi Logosentrisme akuntansi**
Pada tahap ini peneliti diminta untuk melakukan represi terhadap realitas yang mendasari penafsiran-penafsiran yang berbeda dengan penafsiran logika formal yang merupakan suatu bentuk logosentrisme, yaitu pemusatan kebenaran pada logika yang bersifat idealistik, sementara kebenaran atas dasar logika pragmatik dikesampingkan. Logosentrisme merupakan sasaran dekonstruksi pada tahap ini, sebagai upaya untuk tidak memusatkan kebenaran hanya pada logika formal.
5. **Pengkomunikasian pembacaan semiotika dekonstruksi secara retorik**
Pada tahap ini peneliti mengkomunikasikan dalam bentuk uraian naratif, dengan menggunakan ungkapan metaforik atau analogi-analogi.

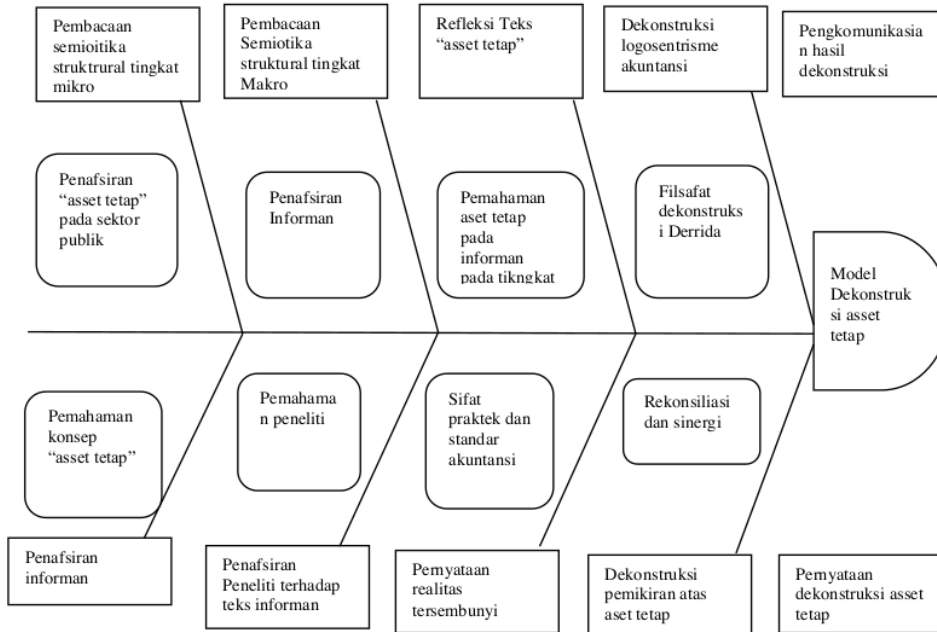
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian dekonstruksi pada umumnya membedah sebuah struktur kata, makna dan pemahaman aset tetap. Penelitian ini disesuaikan dengan tahapan Carrigan (1996). Penelitian dekonstruksi berkaitan aset tetap terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. **Pembacaan Oleh Informan dengan Semiotika struktural –Tingkat mikro (penafsiran teks)**
2. **Pembacaan Semiotika struktural oleh informan – Penafsiran Aset tetap sektor publik.**
3. **Pembacaan Semiotika struktural peneliti – pada Tingkat makro**
4. **Refleksi pada makna akuntansi asset tetap**
5. **Dekonstruksi Logosentrisme akuntansi**
6. **Pengkomunikasian pembacaan semiotika dekonstruksi secara retorik, dengan menyimpulkan dan meverifikasi. Kesimpulan ini bersifat sementara.**

Yang dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 4.1. BAGAN ALUR PENELITIAN DEKONSTRUKSI MODEL ASSET TETAP PADA SEKTOR PUBLIK



Pembahasan Hasil Penelitian

Pembacaan Pada Semiotika struktural oleh informan –Tingkat mikro (penafsiran aset tetap)

Pada tahap ini akuntan yang selanjutnya disebut informan diminta untuk menafsirkan atau mengartikan kata aset tetap. Informan tidak diarahkan secara spesifik untuk melakukan pembacaan semiotika pada tataran kerangka konseptual, khususnya konsep aset tetap yang mendasari praktik akuntansi saat ini. Tahap ini peneliti tidak mengarahkan apapun berkaitan spesifikasi, klasifikasi, aturan atau hal-hal lain berkaitan aset tetap. Di bawah ini adalah garis merah yang ditulis berdasar hasil wawancara peneliti dengan informan. Hal-hal diluar konteks aset tetap tidak dicantumkan.

1. Informan A sebagai Akuntan Publik

Informan A memberi penjelasan berkaitan Aset tetap. Menurut Informan A : Aset dari bahasa Inggris “*asset*” artinya sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis, memiliki nilai yang komersial dan dimiliki suatu organisasi, instansi dan badan usaha atau individu (perorangan). Sudut akuntansi “Aset tetap adalah seperangkat aset dipakai pada sebuah aktivitas produksi suatu perusahaan serta tidak untuk dijual. Aset tetap adalah bagian dari aset yang tidak lancar dengan jangka manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dengan bentuk siap pakai, dibangun dahulu, atau digunakan untuk operasional perusahaan, aset tidak dimaksudkan dijual dalam rangka kegiatan normal suatu perusahaan. Aset mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Informan melanjutkan kembali contoh dari aset tetap antara lain bangunan, tanah, kendaraan, mesin, computer, alat-alat produksi, serta aset tetap lain, namun tergantung entitas masing-masing dalam menentukan aset tersebut tergolong aset tetap, dipakai dalam kegiatan produksi. Karena aset memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau memiliki manfaat jangka panjang, maka aset tetap juga akan mengalami suatu penyusutan. Aset tetap diatur dalam PSAK 16. Informan A menambahkan suatu barang berwujud akan diakui, dikelompokkan menjadi aset apabila: kemungkinan besar mempunyai masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang terus mengalir ke perusahaan, juga biaya perolehan atas sebuah aset tersebut bisa diukur secara andal.

2. Informan B sebagai Akuntan Pemerintahan

Informan kedua adalah Informan B. Ibu ini bekerja sebagai akuntan pemerintahan. Informan B memberikan penjelasan berkaitan aset tetap. Menurut Informan B aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Aset ada akibat dari kegiatan masa lalu memiliki manfaat secara ekonomi dimasa depan oleh pemerintah atau masyarakat. Aset bisa diukur dengan satuan uang, juga non-keuangan yang disiapkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Juga sumber-sumber daya juga akan dipelihara sebagai sejarah dan atau budaya. Aset tetap diklasifikasikan menjadi: peralatan, tanah, mesin, gedung dan bangunan, irigasi, jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya, juga konstruksi dalam pengerjaan.

3. Informan C sebagai Akuntan Manajemen

Informan ketiga adalah Informan yang beroperasi akuntan manajemen dari kantor konsultan manajemen selanjutnya akan di sebut informan C. Saat diberikan pertanyaan apa arti aset tetap, Informan C mendiskripsikan Setiap ada barang fisik (yang berwujud) atau adanya hak (yang tak berwujud) mempunyai nilai nominal adalah aktiva. Aset tetap atau aktiva adalah aset berwujud bisa barang, benda atau fisik yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional sehari-hari entitas dalam mencapai tujuan entitas. Jika suatu entitas tidak mempunyai aset tetap, entitas tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya dan tidak menghasilkan produk atau jasa untuk dijual yang pada akhirnya berpengaruh pada untuk kehidupan entitas tersebut. Aset tetap merupakan aset yang berwujud, digunakan untuk proses penyediaan barang dan jasa, aset disewakan ke pihak lain, selain itu untuk tujuan administrative. Diharapkan digunakan selama masa lebih dari 12 bulan. Informan C menambahkan Aset tetap mempunyai 3 ciri yaitu berwujud, penyedia barang atau jasa, dan tetap harus mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dan diklasifikasikan sebagai *property, plant, and equipment* (PP&E) (PP&E) di neraca.

4. Informan D sebagai Akuntan Pendidik

Informan keempat berprofesi sebagai akuntan pendidik yaitu dosen akuntansi, yang selanjutnya di sebut Informan D. Informan D sebagai menyatakan pengertian aset secara umum adalah: “ Suatu barang (*thing*), segala barang (*anything*) yang memiliki nilai ekonomis (*economic value*) dan memiliki nilai tukar (*exchange value*) pada sebuah badan usaha dan instansi atau individu (perorangan). Beliau juga menambahkan jika aset tetap adalah aset dengan masa jangka panjang bersifat permanen, antara lain; kendaraan, tanah, gudang, bangunan serta peralatan. Aturan Tidak memiliki standar menyangkut berapa usia terendah yang diperlukan untuk aset supaya mampu diklasifikasikan sebagai sebuah aset tetap. Informan menambahkan lagi, Aset berwujud yang digunakan saat proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk dipinjamkan pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari waktu satu periode. Aset memiliki karakteristik aset tersebut diperoleh akan dipakai untuk operasinal dan tidak untuk dijual kembali, sifat jangka panjang dan juga subjek penyusutan. Aset tersebut juga memiliki subtansi fisik. Lalu informan menyimpulkan sendiri bahwa aset tetap memiliki beberapa ciri, yaitu : aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari satu periode, aset tetap berbentuk fisik, , sifat jangka Panjang. Aset tetap juga disusutkan pada jangka waktu yang berjalan, selama aset tetap digunakan, karena aset tetap nilainya pasti akan menurun, terutama tidak terjadi jumlah biaya-biaya untuk dapat dikapitalisasi yang menambah masa jangka manfaat aset tetap tersebut. Aset tetap wajib dapat diukur, disajikan harus sesuai dengan keadaan aset tersebut. Nantinya akan dapat membantu perusahaan memperlihatkan kinerja yang baik perusahaan kepada para investor. Sehingga, berefek pada peningkatan nama baik perusahaan.

Pembacaan Semiotika struktural oleh informan – Penafsiran Aset tetap sektor publik.

Tahap berikutnya akuntan yang selanjutnya disebut informan sama seperti tahap sebelumnya untuk menafsirkan atau mengartikan kata aset tetap. Perbedaan nya adalah Aset tetap di Pemerintahan. Informan tidak diarahkan secara spesifik oleh peneliti untuk melakukan pembacaan semiotika pada tataran rerangka konseptual, khususnya konsep aset tetap pemerintahan yang mendasari praktik akuntansi saat ini. Tahap ini peneliti tidak mengarahkan

apapun berkaitan spesifikasi, klasifikasi, aturan atau hal-hal lain berkaitan aset tetap. Dibawah ini adalah garis merah yang ditulis berdasar hasil wawancara peneliti dengan informan. Hal-hal diluar konteks aset tetap tidak dicantumkan.

1. Penafsiran Aset Tetap Pemerintahan menurut Informan A sebagai Akuntan Publik

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang ada pada pemerintah karena sebuah peristiwa di masa lalu. Memiliki manfaat ekonomis dan manfaat sosial dimasa depan diharapkan akan diperoleh baik pemerintah atau masyarakat. Aset bisa diukur menggunakan satuan uang, atau non-keuangan. Aset ini dibutuhkan guna pelayanan jasa untuk masyarakat dan untuk sumber daya yang telah dipelihara dengan alasan sejarah serta budaya. Jika dipemerintahan daerah ada Aset Negara/daerah atau disebut Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 Nomor 27 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Nomor 28 hal perubahan dari PP Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Yang mengatur berkaitan banyak halantara lain : objek penyusutan BMD, nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, metode penyusutan, penghitungan dan pencatatan dan penyajian dan pengungkapan. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07, aset tetap dikategorikan menjadi beberapa, anatara lain: tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi serta jaringan juga aset tetap yang lain, konstruksi proses pengerjaan. Dengan kewajiban instansi pemerintah agar mampu menyajikan nilai aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 berkaitan akuntansi aset tetap, dimana setiap pemrosesan penerapan pada akuntansi aset tetap diwajibkan sesuai standar yang ditetapkan dimulai dari tahap pengakuan, tahap pengukuran, tahap penghentian dan tahap pelepasan, dan pengungkapan aset tetap. Pada praktiknya, saat penerapan PSAP No. 07 oleh pemerintah, ternyata masih ada berbagai permasalahan. Diperoleh dari hasil penelaahan yang dilakukan atas permintaan pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), peneliti membagi permasalahan yang ada, yang dihadapi oleh instansi pemerintah saat menerapkan akuntansi aset tetap pada 4 permasalahan pokok antara lain: Pengakuan, Pengukuran, masalah pengklasifikasian dan Penyajian atau Pengungkapan. Tahap pertama, tahap pengukuran berkaitan kapitalisasi aset tetap masih banyak dibahas subjek, terutama berkaitan komponen biaya penunjang yang bisa dikapitalisasi; selanjutnya perubahan kebijakan berkaitan batasan nilai kapitalisasi dan biaya setelah diperoleh aset tetap. Kedua, pengakuan aset tetap sesuai penguasaan fisik dan bukti kepemilikan. Kasus seperti ini banyak ada salah satunya aset tetap yang berupa tanah. Ketiga, pengklasifikasian aset tetap, terutama untuk aset tetap yang melekat pada aset tetap lainnya, banyak ditemui terutama pada gedung yang memiliki fasilitas lift, pagar, taman, bangunan untuk ibadah, dsb. Keempat, bagaimana penyajian dan pengungkapan pada aset tetap, khususnya terkait *cost sharing* saat memperoleh aset tetap dan biaya yang timbul dari pemeliharaan aset tetap pihak lain yang terdampak *force majeure*.

2. Penafsiran Aset Tetap Pemerintahan menurut Informan B sebagai Akuntan Pemerintahan

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang telah dikuasai dan atau telah dimiliki pemerintah akibat kejadian masa lalu karena manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan mampu didapatkan, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat. Selain itu aset tetap merupakan asset yang berwujud memiliki manfaat dengan masa diatas dua belas bulan. Dapat dimanfaatkan untuk operasional pemerintah atau digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Aset juga dapat diukur terutama satuan uang, juga barang lain yang digunakan bagi penyediaan jasa untuk masyarakat secara umum. Sumber-sumber daya yang ada telah dipelihara pemerintah untuk sejarah serta budaya. Aset tersebut dibeli dari APBD. Beliau menambahkan aset yang dimaksud adalah Barang Milik Daerah, khususnya yang dibeli atau diperoleh dari APBD atau dari perolehan lain yang sah. Barang tersebut seperti : Barang yang diperoleh dibeli atas beban APBD, diperoleh dari sebuah hibah atau sumbangan, diperoleh atas pelaksanaan dan perjanjian kontrak, diperoleh atas dasar ketentuan undang-undang, diperoleh atas dasar keputusan pengadilan yang ada kekuatan hukum tetap. Ditambahkan lagi, aset dapat bersumber dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Contohnya seperti : Gedung, tanah, bangunan, peralatan, mesin, irigasi, jaringan jalan, konstruksi, cagar budaya,

cagar alam, objek wisata, tambang dan lain-lain. Aset ada 6 golongan dan 20 jenis sub golongan. Sebagai Acuan, dapat menggunakan Peraturan Pemerintah tahun 2014 nomor 27 berkaitan aturan pengelolaan barang milik negara atau daerah serta Peraturan Pemerintah tahun 2020 nomor 28 perihal adanya perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah yang terdapat suatu dimensi keuangan dan suatu dimensi akuntansi. Pada Peraturan Pemerintah ini menjelaskan pengelolaan BMN/D dibagi menjadi: Bagian perencanaan kebutuhan dan penganggaran, bagian pengadaan barang, bagian penggunaannya, bagian pemanfaatannya, bagian pengamanan dan pemeliharannya, bagian penilaiannya, pemindahtanganan, bagaimana pemusnahan, bagaimana penghapusan, serta penatausahaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Peraturan Pemerintah berkaitan tentang Barang Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor. 27/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 28/2020 adalah mengenai panduan untuk proses administrasi Barang Milik Negara antara lain berkaitan penguasaan dan pengelolaan serta pertanggung jawaban secara fisik Barang Milik Negara. Pertanggungjawaban pada semua tahapan pengelolaan Barang Milik Negara diungkapkan pada laporan keuangan pemerintah tersebut. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 27/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 28/2020 tidak mengatur bagaimana pencatatan akuntansi pemerintah terhadap Barang Milik Negara dan dalam penyusunan neraca pemerintah tidak menjadi acuan. Perihal pencatatan Barang Milik Negara, pada instansi pemerintah sebagai entitas, pelaporannya berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dinyatakan dalam bentuk PSAP tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2020

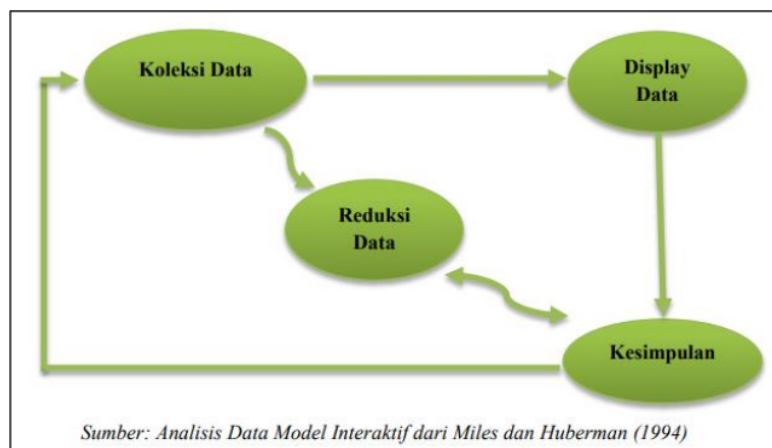
3. Penafsiran Aset Tetap Pemerintahan menurut Informan C sebagai Akuntan Manajemen
Informan 3 memberikan jawaban Aset tetap disebut sebagai aset pemerintah, hak milik pemerintah diperoleh dari aktifitas masa lalu yang digunakan untuk aktifitas ekonomi atau sosial penggunaannya secara terus menerus oleh pemerintah, mampu diukur dengan satuan uang, dan non-keuangan berumur manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tetap adalah suatu bagian inti dari aset pemerintahan, oleh karena itu signifikan pada penyajian neraca. aset tetap pemerintah termasuk didalamnya: Aset tetap yang ada pada entitas pelaporan tetapi digunakan oleh entitas lain, seperti instansi pemerintah yang lain, kontraktor, universitas ; Hak atas penggunaan tanah. Pada SAP dijabarkan yang bukan termasuk pada definisi aset tetap, antara lain aset saat ini telah dalam kuasa yang digunakan pada aktivitas operasi pemerintah. Contohnya bahan baku dan perlengkapan kantor. Saat ada kewajiban neraca disusun, tahap pengakuan atau pencatatan, pengklasifikasian, proses penilaian, dan proses penyajian serta proses pengungkapan aset tetap adalah target utama akuntansi, sebab bagaimanapun dalam aset tetap ada suatu nilai signifikan serta ada kompleksitas tinggi. Peraturan atau standar yang mengatur Akuntansi aset tetap adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) khususnya pada nomor 7, standar ini menunjukkan suatu pedoman untuk pemerintah saat tahapan pengakuan, tahapan pengklasifikasian, tahapan pengukuran, dan saat penyajian serta saat pengungkapan aset tetap dari kejadian yang telah terjadi. Bagaimana perolehan pertama kali diterima aset tetap tersebut, saat pemeliharaan akan aset tetap, saat aset tetap dipertukarkan, saat aset tetap diperoleh baik dari hibah atau dari donasi, serta penyusutan pada aset tetap. Oleh karena itu diperlukan manajemen untuk mengelola Aset. Manajemen aset adalah sistem bagaimana menjaga, memelihara dan memanfaatkan modal dari publik. Dilakukan supaya tertib administrasi pada pengelolaan barang milik daerah agar dapat tercipta manajemen pemerintahan yang efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama manajemen aset yaitu agar potensi pelayanan aset dapat optimal dan dalam rangka meminimalkan risiko dan biaya serta memastikan adanya peningkatan positif dari pemanfaatan modal alam dan sosial selama siklus hidup aset.
4. Penafsiran Aset Tetap Pemerintahan menurut Informan D sebagai Akuntan Pendidik
Standar akuntansi berkaitan aset tetap terutama pada pemerintah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2020. Standar ini memiliki tujuan menyusun perlakuan akuntansi pada aset tetap antara lain perlakuan pada saat pengakuan aset tetap, khususnya pengungkapan aset tetap yang ada pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Standar ini memiliki ruang lingkup yaitu pada seluruh

unit pemerintahan yang membuat laporan keuangan tentang perlakuan akuntansi, termasuk perlakuan pengakuan, perlakuan penilaian, saat penyajian, dan saat pengungkapan yang dibutuhkan. Menurut Informan aset tetap adalah aset yang berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, aset dimaksudkan digunakan pada kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset sendiri menurut partisipan adalah suatu sumber daya pada ekonomi yang ada pada pemerintah untuk tujuan digunakan oleh instansi itu sendiri atau untuk masyarakat. Menurut PSAP No. 07 aset tetap dikategorikan menurut kesamaan pada sifat dan fungsi untuk kegiatan operasi entitas. Pada aset tetap diklasifikasi antara lain: Tanah, adalah tanah yang proses perolehan dipakai untuk digunakan kegiatan operasional oleh pemerintah dan pada kondisi siap pakai. Kedua, Mesin serta Peralatan, termasuk didalamnya mesin-mesin, alat elektronik, kendaraan bermotor, segala inventaris kantor, dan peralatan lain dianggap memiliki nilai signifikan dalam kondisi siap pakai dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Ketiga gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai kegiatan operasional pemerintah dan juga dalam kondisi yang siap dipakai. Keempat, adanya irigasi, jalan, dan segala jaringan yang telah dibangun oleh pemerintah, jaringan yang dimiliki akan atau telah dikuasai pemerintah serta kondisi yang siap dipakai. Kelima, Aset Tetap yang lain, antara lain aset tetap yang tidak mampu diklasifikasikan ke dalam aset tetap. Aset tersebut diperoleh atau didapatkan dan dimanfaatkan pemerintah pada proses aktifitas operasional pemerintah. Aset juga dalam kondisi siap pakai. Keenam, konstruksi pada proses pengerjaan, antara lain aset tetap yang ada pada proses pembangunan yang sampai laporan keuangan ternyata tidak selesai secara keseluruhan.

Pembacaan Semiotika struktural oleh informan – Penafsiran Aset tetap sektor publik.

Tahap berikutnya peneliti melakukan penafsiran terhadap apa yang sudah ditafsirkan oleh informan, tujuan pembacaan semiotika tingkat makro adalah berupaya untuk menemukan dan memperoleh pemahaman tentang “realitas yang direpresentasikan oleh “makna baru” oleh informan. Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Analisa Data tersebut memiliki arti sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga memiliki karakteristik atau memiliki sifat-sifat data tersebut agar dapat dengan mudah dimengerti dan akhirnya mampu untuk menjawab masalah masalah kegiatan penelitian, salah satunya berkaitan tentang deskripsi data maupun membuat induksi atau sampai menarik kesimpulan. Intinya analisis pada data kualitatif dilakukan secara bersamaan tahap pengumpulan data.

Teknik untuk analisis data penelitian ini juga dilakukan menggunakan suatu teknik analisis data Miles dan Huberman (1992) yang terdiri beberapa tahapan secara simultann yaitu ada reduksi data, tahapan penyajian data, dan terakhir ada tahap penarikan kesimpulan (verifikasi).



Gambar 6.1 Tahapan Analisis Data

Berdasar tahapan analisis data diatas dapat disimpulkan.

Para akuntan memahami dengan jelas definisi Aset tetap terutama Aset tetap sektor publik. Dapat ditarik kesimpulan Aset menurut akuntan merupakan suatu sumber daya bidang ekonomi dikuasai, dimiliki secara sah oleh pemerintah akibat dari suatu peristiwa di masa lalu, dari adanya manfaat bidang ekonomi dan sosial. Harapan bisa memperoleh manfaat dimasa depan. Aset mampu dinilai dengan suatu satuan uang, juga sumber daya bidang non-keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan jasa untuk masyarakat. Sumber-sumber daya tersebut dipelihara dengan untuk sejarah dan budaya. Aset tersebut dapat dibeli dengan APBD. Aset yanpada pemerintah yang menjadi hak milik pemerintah didapatkan atau diperoleh dari sebuah aktifitas masa lalu yang digunakan dalam aktifitas ekonomi dan social, digunakan secara terus menerus oleh pemerintah, dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, bisa diukur dalam satuan uang atau nonkeuangan, aset berumur manfaat lebih dari 12 bulan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Yang mengatur berkaitan banyak halantara lain : objek penyusutan BMD, nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, metode penyusutan, penghitungan dan pencatatan dan penyajian dan pengungkapan. Pemerintah (PSAP) No. 07 dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2020 merupakan standar akuntansi yang menjelaskan bagaimana mengatur aset tetap yang ada pada pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi. Pernyataan memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengakuan aset tetap, pengklasifikasian aset tetap, pengukuran aset tetap, dan penyajian aset tetap, tahapan pengungkapan aset tetap harus berdasar pada kejadian yang terjadi. Contohnya saat perolehan pertama aset tetap, pertama bagaimana pemeliharaan aset tetap dan pertukaran aset tetap, Perolehan aset dapat dari berbagai sumber seperti hibah atau donasi, dan bagaimana penyusutan aset tetap. Berdasarkan diskripsi yang dijelaskan oleh para para partisipan tersebut, disesuaikan dengan defisini teori yang berlaku, terlihat bahwa partisipan memahami secara jelas aset tetap pada sektor publik.

Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini bagi Teori memperkaya ranah akuntansi terutama penelitian kualitatif. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi para peneliti – peneliti akuntansi terutama aset tetap, untuk meneliti lebih detail lagi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Manfaat bagi praktisi terutama untuk pemerintah daerah, harapannya hasil penelitian mampu memberikan gambaran pemahaman akuntan dilingkungan pemerintahan akan aset tetap daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sama halnya dengan penelitian lain, memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sistem wawancara yang kurang intens sehingga hasil kurang optimal dan keterbatasan sedikitnya partisipan sehingga hasil kurang dapat digeneralisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada penelitian ini menarik kesimpulan bahwa para akuntan sebagai partisipan memahami dengan jelas definisi Aset tetap terutama Aset tetap sektor publik. Disimpulkan Aset tetap merupakan suatu sumber daya bidang ekonomi telah dimiliki dan dikuasai secara sah oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah akibat peristiwa di masa lalu, memiliki manfaat bidang ekonomi dan sosial masa depan, baik itu oleh pemerintah pusat atau daerah serta masyarakat. Aset tetap mampu diukur dengan suatu satuan uang, dimana termasuk juga sumber daya non-keuangan yang dibutuhkan dalam rangka pengadaan jasa untuk masyarakat. Sumber - sumber daya yang telah dipelihara dengan alasan untuk sejarah dan budaya. Aset tersebut dapat dibeli atas APBD. Aset yang ada pada pemerintah yang menjadi hak milik pemerintah didapatkan atau diperoleh dari sebuah aktifitas masa lalu yang digunakan dalam aktifitas ekonomi dan social, digunakan secara terus menerus oleh pemerintah, dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, bisa diukur dalam satuan uang atau non-keuangan, aset berumur manfaat lebih dari 12 bulan.

Saran

1. Hasil analisis perhitungan menyarankan untuk lebih mendalami penelitian agar lebih dalam, peneliti juga melakukan survei lebih mendalam dengan menyebarkan kuesioner pada para akuntan pemerintahan di area kota Kalimantan selatan, tidak hanya wilayah Kota Banjarmasin.
2. Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah akan ditentukan baik dan tidaknya penatausahaan aset tetap yang ada pada pemerintah daerah tersebut. Dimulai dari pembukuan, tahapan inventarisasi dan serta tahapan pelaporan merupakan sebuah proses penatausahaan pada barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meningkatnya sebuah sistem penatausahaan tersebut, maka menunjukkan bahwa tingkat kualitas pada laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin lebih *reliable*. Mengapa, karena jumlah aset yang ada pada daftar yang ada pada pemerintah daerah tersebut benar-benar menunjukkan jumlah yang sebenarnya.
3. Penelitian berikutnya agar lebih menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. Perlakuan akuntansi dimulai dari penggolongan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan nomor 8. Sehingga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, A. 2005. The conceptual arguments concerning accounting for public heritage assets: a note. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 18.3 (2005): 434-440. 18 (3):434-440.
- Barton, A. D. 2000. Accounting for public heritage facilities - assets or liabilities of the government? *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 13 (2):219-235.
- BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. LHP Nomor 72A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.
- BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. LHP Nomor 68A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018.
- Budiyono, Muhtadi, dan Firmansyah. 2015. Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu*, Vol 17, No 3.
- Byrne. 1994. The Review of Local Government: The Effects on the Management of Property Assets. *Property Management*, Vol. 12, Issue: 3, pp. 5-8.
- Carrigan, C. 1996. Jacques Derrida, Deconstructionism and Postmodernism. *Paper Introduction to the Life and Work of Derrida* [Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Memilih di antara Lima Pendekatan (3 Cetakan). Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks.
- Derrida, J. (2003). Remarks on Deconstruction and Pragmatism 1. In *Deconstruction and pragmatism* (pp. 77-88). Routledge.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2017. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI.
- Huberman, M. (1992). Analisis data kualitatif. *Jakarta: UI Pres, TT.*
- Helmina, M. R. A., & Raysalefy, E. N. Usaha Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berdasar Analisis Kelayakan Investasi dalam Belanja Modal. *Jurnal Wawasan Manajemen* 10 (1)
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Kell, Walter G. 1996. *Accounting Principles*. Edisi ke-4. New Jersey: Jhon Wiley & Son.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mills, L. F., & Newberry, K. J. (2001). The influence of tax and nontax costs on book-tax reporting differences: Public and private firms. *Journal of the American Taxation Association*, 23(1), 1-19.
- Ngoc, B. T. (2020). Impact of factors on fair value accounting: Empirical study in Vietnam. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(3), 10-26. [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(3\)](https://doi.org/10.21511/imfi.17(3)).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Ranuba, E. D. S., S. Pangemanan, and S. Pinatik. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Berdasarkan No.71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan, *Jurnal EMBA* 3 (1): 388-397.
- Stanton, P., and P. Stanton. 1997. Governmental accounting for heritage assets: economic, social implications. . *International Journal of Social Economics* 24 (7):988-1006.
- Bogt, H., & Tillema, S. (2016). Accounting for trust and control: Public sector partnerships in the arts. *Critical Perspectives on Accounting*, 37, 5-23.
- Yuniarto, A. (2020). Melihat Perlunya Pemerintah Melakukan Program Revaluasi Aset. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 1-8.

DEKONSTRUKSI ASET TETAP PEMERINTAH OLEH AKUNTAN KOTA BANJARMASIN

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.djkn.kemenkeu.go.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	www.jwm.ulm.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
5	www.neliti.com Internet Source	1%
6	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	1%
7	smartaccounting.files.wordpress.com Internet Source	1%
8	www.jogloabang.com Internet Source	1%
9	media.neliti.com Internet Source	1%

10	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1 %
13	www.bircu-journal.com Internet Source	1 %
14	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	1 %
15	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
16	sacandra.wordpress.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On